

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Remisi**

##### **1. Pengertian Remisi**

Remisi adalah proses pembinaan Narapidana di luar RumahTahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.<sup>17</sup>

##### **2. Dasar Hukum Pemberian Remisi di Indonesia.**

Sebelum kita mengetahui landasan hukum tentang remisi terhadap Narapidana, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dan mendalami tentang pengaturan remisi di Indonesia.

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan, akan tetapi dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang berturut-turut sebagai berikut:

1. Gouvernement Besluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 Bijnlad Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942; Merupakan remisi

---

<sup>17</sup>PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 bagian 7, Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.

2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03.HN.02.01. tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.
4. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri

Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu pada nomor 5 di atas, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut masih dapat ditambahkan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor

M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang remisi terhadap Tindak Pidana Korupsi, maka terlihat bahwa di sini, pemerintah serius dalam mengatur, mengawasi dan memberlakukan tentang remisi yang berlaku di Indonesia. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa macam remisi di Indonesia adalah banyak dan beragam, yang diantaranya disebabkan keberagaman umat beragama di Indonesia. Di bawah ini, nantinya akan ada penjelasan-penjelasan mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang remisi dan yang berkaitan dengan remisi.

## 2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995.

Undang-undang ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan tentang bagaimana Lembaga Pemasyarakatan dan pengaturan masyarakat yang ada di dalamnya. Di dalam keterkaitannya dengan remisi, Undang-undang ini yang menjadi dasar bagi pemberian remisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Hal mengenai remisi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 yang bunyinya adalah Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Remisi dari segi pengertian secara luas, sudah dijelaskan pada pasal ini. Dan masih diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang remisi itu sendiri, misalnya mengenai siapa yang berhak mendapatkannya, syarat-syaratnya, dan lain-lainnya. Dalam undang-

undang ini juga diatur beberapa kosakata pengertian beberapa unsur dalam remisi, misalnya pengertian Narapidana, Terpidana, Lembaga Pemasyarakatan dan AnakPidana.

## 2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh Narapidana. Di dalamnya juga mengatur tentang hak-hak Narapidana. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan remisi. Seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang remisi, pengaturan tentang remisi pada peraturan ini masih belum terlalu khusus, masih luas. Tetapi di dalamnya terdapat tambahan pengaturan, yaitu syarat mendapatkan remisi.

Pada pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat remisi adalah :

1. Berbuat jasa kepada Negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Tetapi kemudian pada perubahannya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, syarat mendapatkan remisi telah berubah yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Dan disana terdapat perkecualian khusus. Pada pasal 34 ayat 3 :

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

Pada akhirnya, remisi diberikan kepada Narapidana pidana tertentu seperti pada pasal 34 ayat 3, sesuai pada pasal 34A, setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan pemberian remisi tersebut, dikeluarkan melalui Keputusan Menteri.

Ketentuan di atas, nantinya akan bertabrakan dengan syarat-syarat mendapatkan remisi terhadap Narapidana pidana yang berubah statusnya menjadi pidana penjara sementara dan remisi tambahan. Sehingga peraturan-peraturan tersebut tidak akan berbenturan dalam ketentuan persyaratan mendapatkan remisi..

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi jo.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik

Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang

Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Ketentuan inilah yang mengatur secara umum tentang remisi, yang masih berlaku sampai saat ini. Disertai dengan pengaturan tambahannya yaitu tentang pelaksanaannya. Di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, semua tentang pengaturan remisi secara garis besarnya ada di sini.

Lahirnya Undang-undang ini tentunya dengan pertimbangan bahwa dalam Undang dalamnya ada penjelasan hak Narapidana tentang mendapatkan remisi, membutuhkan penjelasan yang lebih khusus lagi. Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan tentang remisi ini maka:

1. Diharapkan Narapidana mengetahui adanya remisi dan macam-macam remisi yang ada. Sehingga mereka lebih bersemangat dalam menjalani hari-harinya di Lembaga Pemasyarakatan dengan lebih baik, tentunya untuk selalu memenuhi syarat mendapatkan remisi, yaitu berkelakuan baik.
2. Narapidana mengetahui bagaimana proses mendapatkannya, ataupun mengajukannya. Sehingga jika mereka tidak mendapatkan haknya sesuai yang diatur dalam peraturan tentang remisi, maka narapidana dapat mengetahuinya. Peraturan ini juga merupakan perlindungan hukum Narapidana tentang remisi.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000

tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan

AnakPidana.

Pengeluaran pengaturan ini, menambahkan remisi selain remisi umum dan khusus, seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Dengan persyaratan tertentu, Narapidana dan Anak Pidana mendapatkan remisi tambahan.

Tujuan dari pemerintah memberikan remisi tambahan ini adalah:

1. Memompa semangat Narapidana dan Anak Pidana, agar tetap berkarya, tetap melakukan perbuatan yang berguna bagi Masyarakat dan Negara, dan memberikan ganjaran berupa remisi tambahan, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh Narapidana dan Anak Pidana.
2. Dari Narapidana dan Anak Pidana tersebut berkarya, tentu akan mengurangi kegiatan-kegiatan yang negatif, seperti bersitegang dengan para narapidana, membuat kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih positif. Tentunya dapat membuat kondisi Lapas atau Rutan lebih kondusif dan aman.

### **3. Tujuan Pemberian Remisi.**

Pemberian remisi ini selain untuk memberikan motivasi kepada Narapidana dan Anak Pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai :

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini, banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikatakan pemberian remisi ini menjadi salah satu “katup pengaman” untuk



menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhanlainnya.

2. Dengan 2 kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, remisi umum dan khusus dapat dijadikan alat untuk mengingatkan Narapidana dan Anak Pidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapatkan potongan hukuman akan hilang, karena penilaian kelakuan baik berlaku dalam satu tahun. Di sini pengkondisian perilaku positif, dilakukan secara berkesinambungan.
3. Dengan memberikan remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada terpidana Tindak Pidana Korupsi, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam bukunya Pengantar Penologi, Sanusi Has mengatakan pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan tidak mustahil karena ialah Narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok Narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Narapidana ataupun Anak Pidana lainnya
4. Pemberian remisi adalah salah satu hak Narapidana dan Anak Pidana yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sepanjang dia berkelakuan baik tanpa membedakan

penggolongan jenis Narapidana dan Anak Pidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>

Dapat dimengerti bahwa apabila upaya pemberian remisi ini di satu sisi secara psikologis Negara mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan di sisi lainnya, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, dengan memberikan potongan masa pidananya. Hal ini seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Sahardjo (alm.) (Mantan Menteri Kehakiman) yang menyatakan bahwa “Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk daripada sebelum dia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.”<sup>19</sup>

### **1.1 Macam-Macam Remisi.**

Remisi harus ditentukan macam-macamnya. Apakah pemberian remisi berdasarkan hari besar, kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh narapidana atau anak pidana.

### **1.2 Remisi Umum**

Pengertian remisi umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999

---

<sup>18</sup>Dwidja Priyanto, *op.cit.*, h. 131.

<sup>19</sup>*Ibid.*

tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi adalah:

“Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus”.

Remisi umum, pada poin terpentingnya, merupakan hak yang diberikan berdasarkan hari kemerdekaan Negara ini. Besarnya dari remisi umum, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 1:

- a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

Sedangkan ketentuan pemberian remisi umum dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 2 :

- a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

Sedangkan ketentuan pemberian remisi umum dilaksanakan sesuai

Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 2:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu);
- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelimamasing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan;
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan.

### **3.3 Remisi Khusus.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, remisi khusus adalah:

“Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidan dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing- masing agama”.

Adapun sesuai Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 174 Tahun

1999 tentang Remisi pasal 5 ayat 1, besarnya remisi khusus:

- a) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Sedangkan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 5 ayat 1:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 (satu);
- b) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

### 3.4 Remisi Tambahan

Remisi tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang

Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi adalah:

“Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada Negara adalah:

“Jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara”.

Sedangkan, masih berdasarkan aturan yang sama dengan di atas, yang dimaksud dengan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain:

- a) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan kemanusiaan.
- b) Ikut menanggulangi bencana alam.
- c) Mencegah pelarian atau gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
- d) Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.

Dan yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan adalah:

“Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan/Cabang Rumah Tahan Negara”.

Adapun sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 6, besarnya remisi tambahan adalah:

- a)  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
- b)  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana atau Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

### **3.5 Remisi Susulan.**

Pengertian Remisi Susulan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan, pasal 1 ayat 1, ada 2, yaitu berdasarkan remisi umum susulan dan remisi khusus susulan. Remisi umum susulan berdasarkan pasal 1 ayat 2 adalah:

“Remisi umum yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan remisi khusus susulan berdasarkan pasal 1 ayat 3 adalah:

“Remisi khusus yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

### **3.6 Remisi Dasawarsa.**

Remisi Dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap 10 tahun sekali. Untuk tahun 2005, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- enampuluh tahun, diberikan remisi dasawarsa.<sup>20</sup> Tetapi sayangnya belum ada pengaturannya secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

### **3.7 Perkecualian Dalam Remisi.**

Di dalam pengaturannya tentang pemberian remisi terhadap Narapidana dan Anak Pidana, terdapat beberapa pengaturan khusus atau perkecualian atau syarat tertentu.

1. Pasal 8 ayat 2, penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 140.



Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Pada ayat 3 nya, pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan putusan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2.

2. Pasal 11, remisi sebagaimana pasal 2 dan 3 juga diberikan kepada; Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya dan Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.
3. Pasal 7 ayat 2, jika selama menjalani pidana Narapidana dan Anak Pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat pendataan pertama kali.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-

larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>21</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>22</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>23</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bandung 1996, hlm 7

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta 2001, hlm 22

<sup>23</sup> *Op-cit*, hlm 16

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam bentuk pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan

Pasal 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsure terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Bilamana telah dikemukakan tindak pidana dan unsur-unsurnya maka pembahasan akan dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris "*corruption*", bahasa Belanda "*korruptie*", kemudian muncul dalam bahasa Indonesia "korupsi".

Di dalam kamus bahasa Inggris – Indonesia kita dapat arti korupsi itu : jahat, busuk, mudah disuap. Malaysia menyebutnya kerakusan yang berasal dari kata Arab Resuah<sup>25</sup> Dalam kamus umum buah tangan Poerwadarminta, kata "korupsi" diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa "korupsi" adalah suatu perbuatan tercela dan merupakan penyakit masyarakat.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta 2001, hlm 25-27

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, PT. Bina Aksara Jakarta 1987, hlm 389

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 40 (empat puluh) dari pasal dan ayat Hukum Pidana Materiil di kelompokkan kedalam 7 (tujuh) Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu diantaranya tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 12 huruf i, Pasal 12A, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>26</sup>

Dari sekian banyak ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus diakui merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Pasal 2 ayat (2) menyebutkan :

---

<sup>26</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan UU RI No.30 Tahun 1999 jo. No.20 Tahun 2001*, Mandar Maju Bandung 2010, hlm 147-149

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Pasal 3 menyebutkan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).” Disamping itu pula perlu dikemukakan antara lain : Pasal 5 yang menyebutkan : (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2).Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau

janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 6 nya menyebutkan : (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu pada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

Seperti diketahui bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut “*white collar*

*crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya. Tindak pidana korupsi disebut juga dengan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa). Jadi perbedaan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lainnya hanyalah terletak pada tingkat sosial ekonomi atau pendidikan pribadi pelaku-pelakunya. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui latar belakang atau causanya apa sebab seseorang melakukan perbuatan korupsi, sebenarnya cara pendekatannya pun sama seperti halnya dalam mencari sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan-kejahatan lain oada umumnya.

Menurut pendapat, tentang kuasa atau sebab apa orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor faktor sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini merupakan yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHPidana di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda sewaktu disusun Wetboek van strfrecht untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkan Pasal 423 dan Pasal 425 dalam KUHPidana Indonesia.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah dan Muda Pati Adhyaksa, 2009, dalam kuliahnua dihadapan peserta pendidikan bidang Operasi angkatan ke-V tahun 1983 di Pusdiklat Kejaksaan RI di Jakarta



3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan makin besar anggaran pembangunan makin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.
4. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipat-gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pendapat-pendapat tersebut diatas memang benar, yang terpenting dan terutama adalah faktor mental, yaitu bahwa faktor mental yang tidak sehat lebih dominan untuk mendorong terjadinya perbuatan korupsi. Sebab sekalipun faktor-faktor lainnya ada pada diri seseorang akan tetapi apabila ia bermental sehat tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Faktor agama dan moral yang harus ditegakkan dan dikedepankan dalam rangka penegakkan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentang bagaimana atau apa yang dijadikan sebagai ukuran yang bermental sehat, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Orang itu tidak terlampau terpengaruh oleh unsur-unsur emosional dan dapat menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya.

2. Dia merasakan dan menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kelompok dan dia mempunyai rasa tanggungjawab (tepa salira)
3. Mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia mampu merumuskan tujuan hidup atas dasar kenyataan dan merasa puas apabila dapat berprestasi demi kepentingan semua.

